

PAPER NAME

**PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN (1).
pdf**

AUTHOR

itok wicaksono

WORD COUNT

9051 Words

CHARACTER COUNT

63173 Characters

PAGE COUNT

63 Pages

FILE SIZE

1.2MB

SUBMISSION DATE

Mar 27, 2023 1:08 PM GMT+7

REPORT DATE

Mar 27, 2023 1:09 PM GMT+7

● 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- Crossref database
- 8% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

Editor :
Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

*Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si | Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si
Muhammad Ikbal, S.Sos., M.Si | Muhammad Arif, S.IP., M.I.K | Sumardi, S. IP., M.I.P
Rulda Yunarsiati, S.IP., M.Si | Drs. Itok Wicaksono, M.Si | Ferri Wicaksono, S.IP., M.A.
Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si | Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si | Dr. Erfina, S. Sos., M. Si
Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si | Dr. Andi Tenri Sempa, SIP., M.Si
Muhammad Lutfi, S.IP., M.A | Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si*



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

15

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si

Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si

Muhammad Ikbal, S.Sos., M.Si

Muhammad Arif, S.IP., M.I.K

Sumardi, S. IP., M.I.P

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si

Drs. Itok Wicaksono, M.Si

Ferri Wicaksono, S.IP., M.A.

Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si

Abdul Jabbar, S.I.P.,M.Si

Dr. Erfina, S. Sos., M. Si

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Dr. Andi Tenri Somp, SIP., M.Si

Muhammad Lutfi, S.IP., M.A

Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN

Penulis

15
: Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si | Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si | Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si | Muhammad Arif, S.I.P., M.I.K | Sumardi, S. IP., M.I.P | Rulida Yuniarsih, S.I.P, M.Si | Drs. Itok Wicaksono, M.Si | Ferri Wicaksono, S.I.P., M.A. | Amir Syamsuadi, S.I.P., M.Si | Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si | Dr. Erfina, S. Sos., M. Si | Yusuf Adam Hilman, S.I.P, M.Si | Dr. Andi Tenri Sompas, SIP., M.Si | Muhammad Lutfi, S.I.P., M.A | Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si

Editor : Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Siwi Rimayani Oktora

ISBN : 978-623-487-095-4

No. HKI : EC00202260646

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini kami beri judul "Pengantar Ilmu Pemerintahan". Substansi yang perlu untuk dipelajari dalam memahami ilmu pemerintahan dipaparkan dalam buku ini. Penjelasan ilmu pemerintah yang diawali dengan membahas konsep dasar dari pemerintahan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sistem pemerintahan juga dijelaskan, baik secara umum maupun khusus dari sistem pemerintahan di Indonesia. Urusan pemerintahan juga dibahas dari pemerintahan desa hingga pusat. Unsur demokrasi dalam pemerintahan juga tak lupa diberikan. Sehingga buku ini menjadi hal penting dalam mempelajari ilmu pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB 1 KONSEP DASAR ILMU PEMERINTAHAN & RUANG	
LINGKUP ILMU PEMERINTAHAN	1
A. Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan	1
B. Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan.....	9
Daftar Pustaka	13
Tentang Penulis	15
BAB 2 HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN	
ILMU LAIN	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Pengertian dan lingkup Ilmu Pemerintahan	21
C. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Negara.....	23
D. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik	24
E. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu	
Administrasi Negara/Ilmu Administrasi Publik.....	25
F. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Hukum	
Ketata Negara.....	26
G. Kesimpulan.....	27
Daftar Pustaka	29
Tentang Penulis	31
BAB 3 ASAS ASAS PEMERINTAHAN	32
A. Pengertian Asas Pemerintahan.....	32
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	35
C. Penjelasan Hukum Asas Asas Umum Pemerintahan	
yang Baik	41
Daftar Pustaka	47
Tentang Penulis	49
BAB 4 SISTEM PEMERINTAHAN	50
A. Konsep Sistem Pemerintahan	50
B. Pembagian Sistem Pemerintahan	58

Daftar Pustaka	71
Tentang Penulis.....	73
BAB 5 MAZHAB PEMERINTAHAN.....	74
A. Mazhab Pemerintahan	74
B. Kontestasi Mazhab Pemerintahan.....	77
C. Mazhab Pemerintahan Baru, Memperkuat dan Pengembangan Cara Pandang Ilmu Pemerintahan.....	82
Daftar Pustaka	89
Tentang Penulis.....	94
BAB 6 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	95
A. Pembentukan Pemerintahan Indonesia.....	95
B. Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	98
Daftar Pustaka	105
Tentang Penulis.....	106
BAB 7 PROBLEMATIKA DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI DI INDONESIA.....	107
A. Pendahuluan	107
B. Desentralisasi dan Dekonsentrasi	108
C. Problematika Desentralisasi dan Dekonsentrasi.....	110
D. Alternatif Mengatasi Problem Desentralisasi dan Dekonstrasi.....	113
E. Penutup	115
Daftar Pustaka	117
Tentang Penulis.....	118
BAB 8 PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH	119
A. Konsekuensi Bentuk Negara Kesatuan.....	119
B. Organisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah.....	120
C. Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah	127
D. Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah ...	129
E. Penutup	137
Daftar Pustaka	138
Tentang Penulis.....	140
BAB 9 PEMERINTAHAN DESA	141
A. Terminologi Pemerintahan Desa.....	141

B. Sejarah Perkembangan dan Dinamika Regulasi Pemerintahan Desa	144
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	152
D. Struktur Kelembagaan dan Fungsi Pemerintahan Desa	155
Daftar Pustaka	161
Tentang Penulis	165
BAB 10 KONSEP <i>GOOD GOVERNANCE</i>	167
A. Konsep <i>Good Governance</i>	167
B. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	170
C. Tujuan dan Manfaat <i>Good Governance</i>	173
D. Urgensi <i>Good Governance</i>	175
Daftar Pustaka	180
Tentang Penulis	181
BAB 11 ETIKA PEMERINTAHAN	183
A. Konsep Dasar Etika Pemerintahan	183
B. Pentingnya Etika dan Permasalahannya	185
C. Etika Cabang Ilmu Filsafat	186
D. Faktor yang Memengaruhi Etika	188
E. Al-Qur` An sebagai Sumber Etika	190
F. Ruang Lingkup Etika Pemerintahan	193
Daftar Pustaka	199
Tentang Penulis	201
BAB 12 NEGARA	202
A. Terminologi Negara	202
B. Sejarah Negara	203
C. Jenis-Jenis Negara	205
Daftar Pustaka	211
Tentang Penulis	213
BAB 13 DEMOKRASI	214
A. Definisi Demokrasi	214
B. Sejarah Demokrasi	216
C. Praktik-praktik Utama Demokrasi	223
Daftar Pustaka	225
Tentang Penulis	226
BAB 14 KEKUASAAN	227

A. Pengertian Kekuasaan.....	227
B. Sumber-Sumber Kekuasaan.....	229
C. Dimensi-Dimensi Kekuasaan	232
D. Wewenang (<i>Authority</i>) dan Legitimasi (<i>Legitimacy</i>).....	235
E. Kekuasaan dalam Konteks Lokal	238
Daftar Pustaka	241
Tentang Penulis.....	242
BAB 15 KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN	243
A. Pemimpin dan Kepemimpinan	243
B. Kepemimpinan dan Kekuasaan	250
C. Kepemimpinan dan Inovasi	255
Daftar Pustaka	258
Tentang Penulis.....	262

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan dan Persamaan Objek Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu-Ilmu Lainnya.....	20
Tabel 8.1	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	123
Tabel 8.2	Klasifikasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasar Beban Kerja	123
Tabel 8.3	Klasifikasi Urusan Pemerintahan	130
Tabel 8.4	Substansi Urusan Pemerintahan Absolut dan Umum.....	131
Tabel 8.5	Substansi Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan...	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Hubungan AUPB dan Asas penyelenggaraan pemerintahan.....	39
Gambar 10.2	Pilar Utama Good Governance	176
Gambar 15.1	Teori Jalur-Tujuan	246

DAFTAR BAGAN

Bagan 8.1 Hubungan Kemitraan antara Kepala Daerah dengan DPRD	122
Bagan 8.2 Tujuan Negara Indonesia	124
Bagan 8.3 Manajemen Pelayanan Publik	125
Bagan 8. 4 Asas - Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	126
Bagan 8.5 Pola Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	128
Bagan 8.6 Mekanisme Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	135
Bagan 8.7 Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Pusat ke Daerah	136

BAB 1

KONSEP DASAR ILMU PEMERINTAHAN & RUANG LINGKUP ILMU PEMERINTAHAN

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email : ahmadmustanir74@gmail.com

A. Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan

1. Definisi Ilmu Pemerintahan

7 Pemerintahan adalah sebuah ilmu dan juga seni. Disebut sebagai sebuah seni karena ada banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa memiliki dasar pendidikan pemerintahan, tetapi mampu berkiat serta dengan kharismanya menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, karena mampu memenuhi syarat- syarat yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta memiliki kekhasan.

25 Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Dengan demikian perintah adalah perkataan yang dimaksudkan untuk menyuruh dalam melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah. Pemerintah adalah perbuatan (cara, urusan dan sebagainya) memerintah.

73 Jika dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dipisahkan atau dibagi maka akan terdapat perbedaan antara

Daftar Pustaka

- Ar, A. A., Mustanir, A., Syarifuddin, H., Jabbar, A., Sellang, K., Razak, M. R. R., Ibrahim, M., Ali, A., & Irwan, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Sosial Politika*, 2(1), 65–73.
- Hendrayady, A., Arman, Djati, S. N., Afriansyah, Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi* (1st ed., p. 224). Eureka Media Aksara.
- Latif, A., Irwan, I., & Mustanir, A. (2019). Analisis Kepemimpinan Terhadap Optimalisasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, 5(2), 1–20. <https://doi.org/10.20956/xxxxxx>
- Latif, A., Mustanir, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, 5(2), 144–164. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/7977>
- Mariana, D., Yuningsih, N. Y., & Paskarina, C. (2020). Modul Ilmu Pemerintahan. In *Modul*. Universitas Padjajaran.
- 41 Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Mustanir, A. (2020). Implementasi E Government Pemerintahan Desa Dalam Administrasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Web Site Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang). *OSF*.
- 37 Mustanir, A., & Darmiah. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN

Tentang Penulis



Ahmad Mustanir. Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja - Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian - Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari KemendikbudRistek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 14 Buku Ajar/Referensi/Chapter serta memiliki lebih dari 40-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari KemendikbudRistek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat - Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), KemendikbudRistek/Kemenristekdikti dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional.

Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam Rangkingscientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2022 Version 1 Januari 2022 tepatnya urutan 907.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI). Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

BAB 2 | HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN ILMU LAIN

Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si.
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Email: mraisrahmat@gmail.com

A. Pendahuluan

Berkembangnya ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat manusia, sehingga setiap bidang ilmu juga berkembang dan membangun keterkaitan yang kuat antara sebuah ilmu dengan ilmu lainnya. Seperti yang dikatankan oleh Chandler and plano, bahwa; “apabila kehidupan manusia menjadi semakin kompleks permasalahannya, maka yang dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga akan semakin kompleks.(Chandler & Plano, 1988a)

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan dan bidang pelayanan public, sejalan dengan perkembangan teori organisasi mulai dari teori organisasi klasik sampai dengan *post modern* yang dipelopori oleh *Marc and Simon, Jefry Peffer, David Osborne* dan *Ikojiro Nonaka*, dan hal ini memberikan ruang untuk berkembangnya kebutuhan atau dinamika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terlebih pasca pandemic covi 19 sedikit banyak telah merubah wajah pelayanan public sebagai muara dari reformasi birokrasi yang masih menjadi prioritas utama program pemerintah. (Razak, 2022a)(Razak et al., 2021)

Berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia akan memberikan tantangan tersendiri setiap bidang ilmu untuk

Daftar Pustaka

- Academia. (2014). *Academia Summaries. Makalah Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan 4 Ilmu Kenegaraan Lainnya.* file:///E:/Book chapter/Peng Ilmu Pemeritahan/ref/Academia Summary – **67** MAKALAH HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN 4 ILMU KENEGARAAN LAIN.pdf
- 17** Chandler, R. ., & Plano, J. C. (1988a). *The Public Administration Dictionary, Second Edition.*
- 17** Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988b). *The Public Administration Dictionary. Second Edition. Santa Barbara, CA:ABC-CLIO Inc.*
- Kencana, I. (2013). *Pengantar Ilmu Pemerintahan.*
- Kirmadi. (2021). *Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Negara.* <https://panjatan.kulonprogokab.go.id/detil/239/ilmu-pemerintahan-dan-ilmu-negara-oleh-kirmadi-sip>
- Putra, A. S. (2020). **51** Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan Dan Diskursus Republik Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 63–85. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.81>
- Razak, M. R. R. (2022a). Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru. Chapter: New Public Service. In A. Hendrayady (Ed.), *Media Sains Indonesia* (pp. 227–242). Media Sains Indonesia.
- Razak, M. R. R. (2022b). Pengantar ilmu administrasi publik. New Public Governance. In A. Hendrayady (Ed.), *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (pp. 211–224).
- Razak, M. R. R., Abdussamad, Z., Nurdiansyah, W., Ramdani, A., Tauhid, Pakpahan, R. R., Waliah, S., & Sumarni. (2021). Reformasi Administrasi dan Administrasi Publik. In A. Hendrayady (Ed.), *Reformasi Administrasi Publik*. CV. Media Sains Indonesia.
- Sajida, & Suprpto, Y. (2014). *Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan 4*

Tentang Penulis



Muhammad Rais Rahmat Razak. Menulis buku, impiannya sejak jadi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saat bekerja lebih 17 tahun sebagai Manager di PT. LG Electronic dan Group Cibitung Bekasi, terlibat langsung perumusan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Tahun 2009 sampai 2014, Tenaga Ahli Anggota DPR-RI A015-Muchtar Amma dan aktif menulis pada tabloid dwimingguan Senayan.

Setelah menyelesaikan S2 Pemerintahan tahun 2011, mengajar di Fakultas Teknik dan Fisipol Unisma-45 Bekasi. Tahun 2016 bergabung dengan Stisip Muhammadiyah Rappang dan mengelola “Magister Administrasi Publik”. Januari 2018, Ketua Penyatuan STISIP dan STKIP, hingga mendapat persetujuan Kemenristek DIKTI menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang kemudian diangkat menjadi Dekan Fakultas Sains dan Teknologi membawahi lima prodi. Milad pertama UMS-Rappang bersama dengan Kaprodi menulis Book Chapter “Sains Teknologi Merubah Peradaban Dunia”. Pada Musyawarah Aptisi Ajatappareng, berkolaborasi menulis Book chapter, tentang Kampus Merdeka. Pada Milad kedua UMS Rappang dan HUT Kabupaten Enrekang ke-61. Menulis Buku Referensi, “Jejak Pemerintahan Toalala dan Silsilah Arung Enrekang”. September 2021 menulis Book Chapter (BC) Reformasi Administrasi Publik. Januari 2022 menulis BC, “Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru”. April 2022 menulis BC, Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Selain menulis juga aktif melakukan riset, beberapa penelitian yang didanai oleh Kemenristek Dikti, telah dikerjakan dan menghasilkan output berupa Haki dan Jurnal Internasional bereputasi terindeks scopus. Saat ini Penulis juga sedang dalam proses penyelesaian disertasi di program Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar.

Email Penulis: mraisahmat@gmail.com

BAB 3

ASAS ASAS PEMERINTAHAN

Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Email: iqbal.sidrap@yahoo.com

A. Pengertian Asas Pemerintahan

1. Pengertian, kedudukan, dan fungsi dan arti penting AAUPB

a. Pengertian Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Aktivitas atau mediasi otoritas publik dalam gagasan negara bantuan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memahami bantuan pemerintah dan keberhasilan warganya semakin besar. Sebagai syarat pengaturan, kegiatan otoritas publik untuk memberikan bantuan pemerintah juga harus didasarkan pada peraturan dan pedoman yang relevan atau sering ditindaklanjuti berdasarkan *freies ermessen*, namun kegiatan ini sering mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan yang membawa keadaan yang tidak dapat didamaikan antara penduduk dan masyarakat. otoritas publik.

Jazim Hamidi dalam (Sanggup Leonard Agustian 2019) menguraikan pengertian AAUPB sebagai berikut:

- 1) AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara;

Daftar Pustaka

- Aju Putrijanti 1, Ayunda Novia Jasnasari. 2021. "Jurnal Pasopati." *Pasopati* 3(2): 73-79. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati/article/view/7719>.
- DR yusri munaf, SH. M.HUM. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Pe. ed. Elydar Chaidir. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Firna Novi Anggoro. 2022. "Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 5(1): 73-79. <http://www.jurnalumbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/view/2037%0Ahttps://www.jurnalumbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/download/2037/1139>.
- Ibad, Syahrul. 2021. "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1(1): 55-72.
- Kusdarini, Eny. 2019. *Uny Press Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. https://www.google.co.id/books/edition/Asas_Asas_Umum_Pemerintahan_Yang_Baik_Da/9AcREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Melissa Silalahi, Devi. 2020. "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6(1): 50. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/1402/1022>.
- 1 Sanggup Leonard Agustian. 2019. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara." *Jurnal*

Tentang Penulis



Muhammad Ikbal, S.Sos., M.Si, lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, Sul-Sel) 24 Agustus 1986. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah 1 Rappang Tahun 1991, SD Negeri 4 Rappang Tahun 1998, Pondok Pesantren Darul Ihsan Cipotakari tahun 2001, Madrasah Aliyah YMPI Rappang tahun 2004, S1 Stisip Muhammadiyah Sidenreng Rappang Prodi Administrasi Negara Tahun 2014. S2

UNHAS Tahun 2016 Prodi Administrasi Pembangunan.

Pengalaman kerja - Dosen tetap dan ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari KemendikbudRistek/Kemenristekdikti dan juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi.

Pengalaman Organisasi- Ketua Komisariat IMM Stisip Muhammadiyah Sidenreng Rappang periode 2010-2011, Ketua Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2011-2012, Sekretaris Bidang SPM DPD IMM Sul-Sel 2013-2015, ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2019-2023, Dewan Pembina pemuda tani HKTI Sidenreng Rappang periode 2021-2026, dan sebagai anggota Indonesian Association For Public Administration (IAPA).

BAB 4

SISTEM PEMERINTAHAN

Muhammad Arif, S.IP., M.I.K
Universitas Abdurrah Pekanbaru
Email: muhammad.arif@univrab.ac.id

A. Konsep Sistem Pemerintahan

1. Definisi Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Sustema*) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi (Mulachela, 2022). Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara.

Secara umum suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel-variabel yang terorganisir, saling ketergantungan satu sama lainnya dan terpadu. konsep suatu sistem menuntut perancangannya untuk mempertimbangkan sistem sebagai suatu keseluruhan sistem terdiri dari bagian-bagian sistem dan sub sistem. hasil dari suatu sistem adalah menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Informasi sendiri adalah data yang diolah untuk digunakan dalam

Daftar Pustaka

- Adiwilaga, Rendy, dkk (2018), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, CV. Budi Uyama, Yogyakarta
- 59 Asshiddiqie, Jimly (2007) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI
- Bernard, Raho, 2007; *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka Publisher
- 20 Buckley, J. J. (1985). *Fuzzy Hierarchical Analysis. Fuzzy sets and systems*, 17, 233- 247.
- Dahl, Robert. (1994), *Analisa Politik Mordern*, Bumi Aksara, Jakarta
- George Ritzer dan Douglas Goodman, 30 2009; *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi Wacana, Jogjakarta.
- _____, 2009; *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- 40 Lijphart, Arend *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Penyadur: Ibrahim, dkk, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- 45 Ludwig, von Bertalanffy. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Application*. New York: George Braziller, Inc
- 52 Kusnadi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, (1988) *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FH UI
- 44 Mac Iver, R. M. & Charles H. (1961). *Society An Introducing Analysis*. London : Macmilan & co ltd.
- Mahfud, MD. (1993) *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta
- Mahkamah Konsititusi (2016) *Modul Sistem Pemerintahan Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI*
- Misiroglu, Gina. (2003). *The Handy Politics Answer Book*. Visible Ink Pr (November 1, 2003)

Tentang Penulis



Muhammad Arif, S.IP., M.I.K., lahir di Pulau Kecil (Inhil) 11 Juni 1979. Jenjang pendidikan S1 ditamatkan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Pekanbaru Tahun 2003. Penulis menyelesaikan studi Magister-S2 Komunikasi Politik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2014. Selain aktif mengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrah Pekanbaru. Penulis aktif menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan seminar/webinar terkait isu-isu pemilu dan partai politik, komunikasi politik dan pembangunan, selain itu penulis juga aktif sebagai tutor dalam pelatihan kepala desa dan perangkat desa, pengelola BUMDesa.

BAB 5

MAZHAB PEMERINTAH

Sumardi, S. IP., M.I.P

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: sumardi1610@gmail.com

A. Mazhab Pemerintahan

Mazhab pemerintahan menjadi salah satu kajian baru dalam perkembangan ilmu pemerintahan, sejauh penelusuran dan sependek pengetahuan penulis terkait pemerintahan, sangat jarang ada literatur yang secara detail menyajikan pembahasan terkait mazhab pemerintahan maupun mazhab ilmu pemerintahan justru yang berkembang adalah teori-teori pemerintahan baik yang teradopsi dari hindia belanda maupun pelebagaan-pelebagaan studi pemerintahan Indonesia seperti jurusan atau konsentrasi ilmu pemerintahan yang terlembaga di beberapa perguruan tinggi. Oleh sebab itu penulis berusaha menyajikan tulisan ini dengan mengajukan sederet pertanyaan mendasar bahwa apa yang hendak diketahui oleh ilmu pemerintahan?, bagaimana ilmu pemerintahan mengetahuinya?, ciri khas seperti apa yang dimiliki oleh ilmu pemerintahan sehingga berusaha berbeda dan memisahkan diri dari kajian hukum, politik maupun administrasi? Apakah cukup kajian pemerintahan dikembangkan hanya berkutak pada objek material dan formal semata, atau justru diarahkan pada *focus interest* yang lebih mencerahkan melalui subjek dan perpektif?

Almond, G.A, (1990) menjelaskan bahwa beragam sekte, mazhab dan perspektif tentu merupakan kelaziman dalam ilmu pengetahuan, berbicara sekte dan mazhab dalam ilmu politik,

Daftar Pustaka

- 46 Almond, G.A. (1990). A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science. Sage: ⁷¹ *Choice Reviews Online*.
<https://doi.org/10.5860/choice.28-0530>
- Abélès, M. (2015). Governmentality. ²⁸ in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.12196-8>
- Acemoglu, D. (2015). ⁸⁰ Why nations fail? In *Pakistan Development Review*. <https://doi.org/10.30541/v54i4i-iiipp.301-312>
- 13 Benson, S. M. (2017). Democracy and Unfreedom: Revisiting Tocqueville and Beaumont in America. *Political Theory*.
⁴³ <https://doi.org/10.1177/0090591715616851>
- Cooper, R. (2020). Pastoral Power and Algorithmic Governmentality. *Theory, Culture and Society*.
<https://doi.org/10.1177/0263276419860576>
- dos Santos, R. S. P., & Onto, G. G. (2021). Capitalism, Democracy, and Social Theory in Karl Polanyi: An Interview With Gareth Dale. *Sociologia e Antropologia*. <https://doi.org/10.1590/2238-38752021V1111>
- 42 Hanif, H., & Pratikno, P. (2017). Local Politics in Indonesia, 1999-2010: A Literature Review. *PCD Journal*.
<https://doi.org/10.22146/pcd.25773>
- 66 Hoppe, R. (2019). Policy, governing and politicality. *European Policy Analysis*. <https://doi.org/10.1002/epa2.1074>
- 61 Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations?: The Debate. A *Foreign Affairs Reader*.
- 13 Jessen, M. H., & von Eggers, N. (2020). Governmentality and Statification: Towards a Foucauldian Theory of the State. *Theory, Culture and Society*.
<https://doi.org/10.1177/0263276419849099>
- Lee, Y. (2021). Government for Leaving No One Behind: Social

Tentang Penulis



19

Sumardi, Lahir di Popporeng, Kaleru, Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan pada 15 April 1993, Pendidikan Dasar di SDN 274 Kaleru 2001-2006, SMPN 2 Kajuara 2006-2009, SMAN 1 Kajuara 2009-2012, kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai Program Studi Ilmu Pemerintahan 2012-2016, kemudian melanjutkan Program Studi yang sama di

60

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2018-2020. Pengalaman organisasi penulis sejak menjadi mahasiswa antara lain, Ketua HMJ 2014-2015, Pengurus BEM 2014-2015, Ketua Dewan Mahasiswa 2015-2016 serta sejumlah organisasi internal dan eksternal lainnya. Kemudian sejak 10 Oktober 2020 penulis berprofesi sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSi) dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli (AA) sejak 04 Maret 2022. Konsentrasi pengajaran antara lain, Dasar-Dasar Teori Sosial, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Dasar-Dasar Penelitian Sosial, Metode Penelitian, Metodologi Ilmu Pemerintahan dan Teknologi Informasi Pemerintahan, penulis juga konsen melakukan kajian dan publikasi ilmiah pada sejumlah bidang tersebut. Selain tugas fungsional, penulis juga diberi amanah dalam jabatan struktural antara lain, 10 Agustus 2020-20 September 2021 sebagai Staf Publikasi, 10 Oktober 2021 hingga saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UMSi. Tugas tambahan lainnya adalah salah satu Koordinator Pengelola Jurnal Ilmiah lingkup UMSi dan secara khusus sebagai *Managing of Editor* pada *Journal of Government Insight* (JGI) serta Sekretaris *UMSi Press*.

BAB 6

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si

Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: aishaazzahid999@gmail.com

A. Pembentukan Pemerintahan Indonesia

1. Awal Mula Lahirnya Pemerintahan Indonesia

Tepatnya tanggal 29 April 1945 di Jakarta, pemerintah Jepang yang mendirikan suatu Badan Penyelidik Kemerdekaan yang disingkat dengan BPPK. Ketua BPPK saat itu adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat, serta memiliki anggota sebanyak 62 orang. Tujuan BPPK ini menuju cita-cita demi Indonesia merdeka walaupun dengan memanfaatkan strategi untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang.

BPPK melakukan penyelidikan tentang segala hal terkait persiapan kemerdekaan Indonesia, kemudian langsung merancang Undang Undang Dasar juga merancang dasar dasar Negara Indonesia. Pada saat itu BPPK melakukan sidang pertama di 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan melakukan sidang kedua di 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945, serta BPPK juga membentuk dan menugaskan panitia perumus untuk menyimpulkan hasil yang telah dilakukan dalam perundingan.

Panitia yang melakukan rancangan ini beranggotakan 9 orang yang terdiri dari: Soekarno, Moh. Hatta, Kyai.Haji.A Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Kahar Muzakir, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Abikusno

Daftar Pustaka

- 55 Afan, Gaffar. 1999. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Kansil dkk. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 16 Kusnardi & Bintang. 1994. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Mariam, Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta.
- Ndraha, T. 2003. *Kybernologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tentang Penulis



Rulida Yuniarsih, lahir di Pontianak, Kalimantan Barat tanggal 27 Juni 1983. Gelar sarjana Pemerintahan diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta prodi Ilmu Pemerintahan pada tahun 2005. Sedangkan Magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2012. Penulis menjadi Dosen Tetap di prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjungpura sejak tahun 2012.

BAB 7

PROBLEMATIKA DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI DI INDONESIA

Drs. Itok Wicaksono, M.Si

Universitas Muhammadiyah Jember

Email: itokwicaksono@unmuhjember.ac.id

A. Pendahuluan

Sejak bergantinya Rezim Soeharto (Orde Baru) ke rezim reformasi, maka di Indonesia terjadi pergeseran paradigma dalam sistem politik dan pemerintahan, yakni, paradigma sentralisasi ke desentralisasi. Pergeseran ini bagi kalangan pendukung Reformasi sebagai bagian dari demokratisasi dan upayanya menjalankan konsep good governance.

Perubahan paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi tersebut diharapkan akan membawa perubahan kemajuan bangsa yang melesat dengan prinsi-prinsip good governance. Dengan menggunakan desentralisasi diharapkan setiap daerah memiliki keunggulan dan bisa bersaing dalam konteks nasional, regional, dan global, sehingga daerah lebih bisa memakmurkan rakyatnya karena memiliki daya saingnya.

Namun kenyataannya, hampir 20 tahun lebih, sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan dirubah dengan UU 32 Tahun 2004, hasilnya belum terlalu menggembirakan. Banyak problematika yang terjadi dalam pelaksanaannya yang perlu perbaikan terus menerus dan menuntut komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

Begitu juga dengan pelaksanaan dekonsentrasi sebagai implementasi dari UU nomor 32/2004 yang masih terdapat

Daftar Pusataka

- 27 Crawford, G., & Hartmann, C. (Eds.). (2008). *Decentralisation in Africa: A Pathway out of Poverty and Conflict?* Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.5117/9789053569344>
- Klein, R., Maddick, H., Dearlove, J., Wallace, H., & 54 Hyde, S. (1979). Book reviews. *Local Government Studies*, 5(1), 87-92. <https://doi.org/10.1080/03003937908432765>
- 18 KP2A III LAN, T. (2007). KEWENANGAN DEKONSENTRASI DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAANYA* DI DAERAH. *Jurnal Borneo Administrator*, 4(1). <https://doi.org/10.24258/jba.v4i1.23>
- 8 Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- 23 Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 94, 21-28. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>
- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah PP Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Tentang Penulis



Drs. Itok Wicaksono, M.Si, lahir di Jember pada 16-10-1965. Penulis menempuh pendidikan sarjana strata 1 di Universitas Airlangga Lulus tahun 1989 pada prodi Politik Indonesia. Pendidikan pasca sarjana S2 di Universitas Gajah Mada Lulus tahun 1994 prodi Ilmu Politik. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Negeri Jember angkatan 2020, prodi: Ilmu Administrasi Publik. Penulis berprofesi sebagai Dosen tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Ilmu Pemerintahan.

BAB 8

PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ferri Wicaksono, S.IP., M.A.
Universitas Amikom Yogyakarta
Email: wicaksono.ferri@amikom.ac.id

A. Konsekuensi Bentuk Negara Kesatuan

Semboyan “NKRI Harga Mati” sangat melekat dalam benak bangsa Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karakteristik demografis Indonesia dimana telah eksis beragam suku, agama, ras, dan budaya tentu menuntut adanya suatu komitmen bersama untuk menjaga keutuhan Indonesia. Bentuk negara kesatuan menjadi suatu komitmen yang disepakati oleh para tokoh pendiri bangsa yang selanjutnya menjadi harga mati untuk dipertahankan bangsa Indonesia.

Komitmen tersebut telah secara tegas tercantum didalam dokumen konstitusi yakni Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya pada Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 telah pula ditegaskan bahwa bentuk negara kesatuan sudah menjadi pengecualian didalam materi amandemen UUD 1945 sehingga tidak dapat dilakukan perubahan. Sebagaimana disampaikan oleh Prayitno (2019) pembatasan perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tetap menjaga persatuan nasional.

Selanjutnya pada Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa bentuk NKRI mempunyai konsekuensi yakni perlunya membentuk pemerintahan Negara Indonesia atau disebut Pemerintahan

Daftar Pustaka

Adryan, "Harmonisasi Pemerintah dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan," *J. Leg. Indones.*, vol. 16, no. 4, pp. 419-432, 2019.

9 Atmadja, I Dewa gede, dkk, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015

Azhary, *Ilmu Negara Pembahasan Buku Kranenburg*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

5 Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah Titik Berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah (Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah)*. Universitas Atmajaya : Yogyakarta, 1998.

Isra, Saldi, *Gagasan Bernegara Yamin*, *Majalah Tempo*, 2 September 2014

Ropii, I, "POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH (Konsepsi dan Dinamikanya)," *Maksigama*, vol. 9, no. 1, pp. 34-51, 2015, doi: 10.37303/.v9i1.4.

C. Prayitno, "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Constitution Making," *J. Konstitusi*, vol. 15, no. 4, p. 732, 2019, doi: 10.31078/jk1543.

S. H. Lekipiouw, "Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan," *Sasi*, vol. 26, no. 4, p. 557, 2020, doi: 10.47268/sasi.v26i4.414.

Tauda, G. A., "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Adm. Law Gov. J.*, 2018.

Wijayanti, S. Nur, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *J. Media Huk.*, vol. 23, no. 2, pp. 186-199, 2016, doi: 10.18196/jmh.2016.0079.186-199.

Tentang Penulis



Ferri Wicaksono, S.I.P., M.A. adalah alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2016. Karir profesional beliau saat ini sebagai dosen Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta, khusus pada fokus studi kelembagaan, manajemen pemerintahan, dan kepemimpinan. Karir struktural beliau, diantaranya beliau pernah menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta, Plt. Ketua Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta, dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta.

BAB 9 | PEMERINTAHAN DESA

Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si
Universitas Abdurrah Pekanbaru
Email: amir.syamsuadi@univrab.ac.id

A. Terminologi Pemerintahan Desa

1. Definisi Desa

Secara harfiah, “desa” diartikan sebagai: sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung/dusun, udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota) tempat, tanah, dan daerah. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Perkataan desa berasal dari bahasa Sanskerta “Deshi” yang berarti “*tanah tumpah darah*” (Widodo 2015). Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya (Zainal 2016).

Desa selalu menarik untuk dijadikan bahan kajian karena memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi sosial, budaya, politik dan ekonomi. Desa atau sebutan lainnya seperti negeri, marga, kampong, dusun, dati dan sebagainya merupakan sebuah komunitas adat dan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran desa dan

Daftar Pustaka

- Abikusna, R Agus. 2017. "Desentralisasi Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa." *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 11(01): 42-48.
- Afnan, Dikhorir. 2019. "Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Soshum Insentif*. 153-63.
- Ali, Khaidir, dan Agung Saputra. 2020. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar." *Warta Dharmawangsa* 14(4): 602-14.
- 29 Bayo, Longgina Novadona, Purwo Santoso, dan Willy Purna Samadhi. 2018. *Rezim lokal di Indonesia: memaknai ulang demokrasi kita*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chalik, Abdul. 2015. "Pelayanan publik tingkat desa."
- Djaenuri, Aries. 1999. "Sejarah Terbentuknya Desa." In *Modul*, ed. Universitas Terbuka. , 1-34.
- Endah, Kiki. 2020. "Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(1): 135-43.
- Fitrah Nurul et al. 2021. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Swadaya Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Tata Kelola Potensi Desa." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 5(1): 337-44.
- 36 Habibi, Fikri. 2012. "Pasang Surut Otonomi Desa." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 1(1).
- Hajar, Siti, Khaidir Ali, dan Agung Saputra. 2021. "Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora* 6(1): 136-42.
- 57 Irawan, Agus. 2019. "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari

Tentang Penulis



Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si, lahir di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau pada 10 Februari 1989. Jenjang pendidikan S1 ditamatkan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru Tahun 2011. Penulis menyelesaikan studi Magister-S2 Ilmu Politik dengan Konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah pada Program Pascasarjana Universitas Riau tahun 2014. Selain aktif mengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrah Pekanbaru. Sejak Tahun 2018 Penulis ikut tergabung kedalam Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI) yakni forum dosen yang mawadahi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Program Studi Ilmu Pemerintahan. Jabatan struktural dalam pengelolaan Program Studi di Universitas Abdurrah yakni Sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2016-2018, ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2018-2022, dan penulis juga diamanahkan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik (FPSIKOSOSPOL) Universitas Abdurrah tahun 2022-2023. Penulis tergabung kedalam Asosiasi pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan yakni pada Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) dan ditunjuk sebagai Anggota pengurus Pusat pada bidang Kurikulum dengan masa bhakti 2021-2024. Penulis juga aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan terlibat dalam beberapa penelitian tingkat lokal dan nasional serta melakukan beberapa publikasi karya ilmiah dengan kajian politik dan pemerintahan. Diantara karya yang pernah diterbitkan antara lain: Buku *Bijak Mengelola Desa: Sebuah Tinjauan Awal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* penerbit Taman Karya Pekanbaru (2020) dan Buku *Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Perperspektif Kebencanaan, kebijakan dan teknologi Informasi* penerbit Taman Karya Pekanbaru (2020) selain itu penulis juga pernah menerbitkan tulisan pada beberapa laman jurnal

terakreditasi nasional SINTA(*Science and Technology Index*) seperti *Journal of Governance* (JOG) terakreditasi SiNTA 2, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) terakreditasi SINTA 4, JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terakreditasi SINTA 3, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan terakreditasi SINTA 3, Edukatif:Jurnal Ilmu Pendidikan terakreditasi SINTA 4 dan beberapa artikel lain yang dapat ditemukan pada *google scholar* milik penulis.

BAB 10 | KONSEP *GOOD GOVERNANCE*

Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email: jbr.nyonk1@gmail.com

A. Konsep *Good Governance*

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang *governance* yang baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program bantuannya. *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang baik) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Sadu Wasistiono (2003: 23) mengemukakan bahwa tuntutan akan *good governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*.

Daftar Pustaka

- Andriyadi, Fauza. 2019. "Good Governance Government and Government" 1 (2): 85-100.
- Munaf, Yusri, and Yusri Munaf. 1945. *Hukum Administrasi Negara. Pertama*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Sedarmayanti. 2004. "Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik): Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)." *Mandar Maju*.
- UNDP. n.d. "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE." Accessed January 3, 2012. <http://www.scribd.com/doc/4606676/>.
- Widodo, Joko. 2001. "Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah." *Insan Cendekia*.

Tentang Penulis



Abdul Jabbar, Lahir di Pangkajene (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 18 Agustus 1991. Menempuh dan menyelesaikan SD Negeri 4 Pangsidi Tahun 2003, MTs Negeri Pangsidi Tahun 2006, SMA Negeri 1 Pangsidi Tahun 2009, S1 STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2014 Prodi Ilmu Pemerintahan. S2 UNHAS Tahun 2016 Prodi

Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNHAS Makassar.

Pengalaman Organisasi - Pernah sebagai Ketua BEM STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2010 - 2011, Koorda BEM PTM Sulselbar, 2011 - 2012, Presidium Nasional BEM PTM Indonesia Timur Tahun 2012 - 2013, Ketua PC. IMM Sidrap Tahun 2013 - 2014, Sekretaris DPD IMM Sulawesi Selatan tahun 2014 - 2016, Ketua HIPMI PT Sidrap Tahun 2014 - 2017, Ketua DPW Pemuda LIRA Sulawesi Selatan Tahun 2014 - 2017, Ketua DPD KNPI Sidrap Tahun 2017 - 2020, , Ketua DPC Pemuda Tani HKTI Sidrap Tahun 2021 - 2026. Sekarang juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM), Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Sidrap.

Pengalaman Kerja - Pernah sebagai Jurnalis Mitra TV Ajatappareng, Direktur FORMASI Institute, Direktur CV Indovisi Mitra Mandiri, Founder Jasa Layanan Sampah "Pappulung Aropoe" dan saat ini sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

6 Pengalaman penelitian = Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari KemendikbudRistek/Kemenristekdikti, dan 14 internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan kolaboratif di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional bereputasi, serta memperoleh beberapa HAKI.

Pengalaman dalam program-program pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai narasumber/pemateri di berbagai kegiatan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Selain itu, aktif juga dalam membentuk dan mendampingi beberapa desa binaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

6 Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2019 - 2023.

BAB

11

ETIKA PEMERINTAHAN

Dr. Erfina, S. Sos.,⁶ M. Si.

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email : erfina.erul85@gmail.com

A. Konsep Dasar Etika Pemerintahan

1. Definisi Etika

Pengertian Etika Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos. Dalam bentuk tunggalnya berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya ta etha yang berarti adat kebiasaan. Kata inilah menurut Bertens (2007) , yang melatarbelakangi munculnya kata ethica yang di gunakan Aristoteles untuk menunjukkan filsafat Moral. Sedangkan istilah ' Moral' berasal dari bahasa Latin Mos (tunggal) atau mores (jamak) yang sama artinya dengan ethica dalam bahasa Yunani yaitu kebiasaan atau adat. Karena itulah, maka istilah etika kadang-kadang di pertukarkan penggunaannya dengan istilah moral atau keduanya sering dipakai untuk saling menjelaskan. Misalnya, yakni perbuatan yang sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat manusia terlepas dari kedudukan dan peranannya dalam kehidupan sosial. Sedangkan perbuatan yang tidak etis atau immoral berarti perbuatan buruk secara moral.

Etika berasal dari kata Yunani "Ethos" (Ta etha) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika

Daftar Pustaka

Bertens, K. 2007. Etika. Gramedia. Jakarta.

Brewster, R. Wallace. 1963. Government in Modern Society: With Emphasis on American Institutions. 2nd Edition. Houghton Mifflin Company. Boston.

69 Krisyanto, Eddy, 2008. Etika Politik dalam Konteks Indonesia, Kanisius, Yogyakarta.

5 Muchlis Hamdi. 2002. Bunga Rampai Pemerintahan. Yarsif Watampone. Jakarta.

Mund, Vernon A. 1955. Government and Business. 2nd edition. Harper & Brothers, Publishers. New York.

26 Qardhawi, Yusuf. 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press. Jakarta.

49 Qorib dan Zaini. 2020. Integrasi Etika dan Moral: Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan. Bildung. Yogyakarta

5 Niker, John H. 1978. The Art of Ethical Thinking. The University Press of America. Washington DC.

Rusdi, Muhammad. 2022. Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Volume IX, Nomor I Halaman 1-14 P-ISSN 2477-2844 E-ISSN 2615-5

47 Syarif, Mujar Ibnu dan Khamani Zada. 2008. Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Islam. Erlangga. Jakarta.

62 Sufianto, Dadang, 2016. Etika Pemerintahan di Indonesia. Cetakan Ke satu, Alfabeta. Bandung.

Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, Sosiologi Pemerintahan. Ghalia Indonesia, Bogor.

5 Thompson, Dennis F. 1990. "The Possibility of Administrative Ethics." Dalam Frederick S. Lane (ed). Current Issues in Public Administration. St. Martin's Press, 253-265. New York.

Tentang Penulis



Erfina, Lahir di Rappang pada tanggal 19 Mei 1985. Penulis menempuh Pendidikan sarjana di STISIP Muhammadiyah Sidenreng Rappang pada tahun 2004 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, kemudian melanjutkan ke jenjang Pendidikan Magister pada tahun 2010 pada jurusan Administrasi Pembangunan di Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan doktoral di Universitas Hasanuddin Makassar jurusan Ilmu Administrasi Publik. Penulis saat ini berkarir sebagai dosen tetap Yayasan, dengan jabatan Wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) periode 2019-2023. Sebelumnya juga pernah menduduki jabatan sebagai ketua Program studi Ilmu Administrasi Publik periode 2012-2017. Salah satu buku yang pernah ditulis di tahun 2022 adalah Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi) serta beberapa artikel dan Jurnal.

BAB

12

NEGARA

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: adam_hilman@umpo.ac.id

A. Terminologi Negara

Negara adalah sebuah institusi yang mengkomodifikasi kepentingan-kepentingan individu dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat kearah kepentingan bersama (Nizar, 2003). Negara bisa diartikan sebagai sebuah kesatuan wilayah, rakyat, dan pemerintahannya berdaulat, berdiri secara mandiri atau independent serta mampu mencukupi seluruh kehidupan pokok masyarakatnya, berupa: sandang, papan, pangan (Sutaji, Rusliana, & Munir, 2022).

Aristoteles menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *La Politica* bahwa negara adalah sekumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan kebaikan, karena pada prinsipnya manusia bertindak untuk sesuatu yang bernilai baik (Namang, 2020). Istilah Negara dapat diterjemahkan dari Bahasa asing “*stat*” (Belanda dan Jerman), “*State*” (Bahasa Inggris), “*Etat*” (Bahasa Prancis) yang berarti organisasi kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada semua lapisan masyarakat dalam sebuah wilayah (Mahmuda, 2020).

10 Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara

Daftar Pustaka

31

- Asa Briggs (1961). The Welfare State in Historical Perspective. *European Journal of Sociology*, 2, pp 221-258
doi:10.1017/S0003975600000412
- Nizar, H. S. (2003). Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. *Demokrasi*, 95 - 108.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 23 - 33.
- Afzal, R. M., & Ardik, G. T. (2019). Studi Kritis terhadap Ragam Konsep Negara Hukum. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 132-147.
- Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State di Indonesia. *Trias Politica*, 171 - 183.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 131 - 137.
- Junaidi, & Soleha, N. U. (2021). Konsep Negara Kesejahteraan menurut M. Umar Chapra. *Syariah*, 14 - 35.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Jurnal TSAQAFAH*, 157-176.
- Sutaji, W., Rusliana, I., & Munir. (2022). KONSEP NEGARA:PerbandinganIbnu Sina dan Mohammad Natsir. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 583 - 599.
- Amina, S. (2021). Konsep Negara Islam: Telaah atas pemikiran Al - Mawardi. *Nusantara Journal of Islamic Engagement*.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggas Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. *Yustisia*, 136 - 142.
- Kurniawan, P. (2018). Masyarakat dan Negara Menurut Al - Farabi. *Jurnal El-Qanuny*, 101 - 115.

Tentang Penulis



Yusuf Adam Hilman³ merupakan dosen pada Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Gelar Sarjana di tempuh di Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2010. Pada tahun 2013 menyelesaikan Magister Science

Bidang Sosiologi Kebijakan dan Pembangunan, di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Pada saat ini beliau selain mengajar, juga aktif menulis diberbagai jurnal ilmiah, buku, dan artikel media massa. Minat kajiannya adalah di sosiologi pemerintahan dan pembangunan.

BAB

13

DEMOKRASI

75

Dr. Andi Tenri Somp, SIP., M.Si

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Email : tenri@ulm.ac.id

A. Definisi Demokrasi

Demokrasi, secara harfiah, pemerintahan oleh rakyat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *dēmokratia*, yang diambil dari kata *dēmos* (rakyat) dan *kratos* (aturan). Di pertengahan abad ke-5 SM istilah ini mulai lazim digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang saat itu ada di beberapa negara kota (*polis*), terutama Athena (Dahl, 2013). Jika berbicara definisi demokrasi secara lebih lengkap banyak arti yang melekat pada kata demokrasi. Jika ada satu yang benar artinya maka itu, memang, seperti yang diungkapkan oleh Platon, “disimpan di surga”. Demokrasi merupakan konsep yang oleh beberapa filsuf disebut sebagai konsep yang diperdebatkan definisinya.²

Demokrasi merupakan salah satu istilah yang tidak akan pernah bisa didefinisikan dengan mudah karena definisi dan esensi demokrasi memiliki perbedaan sosial, moral, budaya serta juga politik. Tidak ada definisi mutlak tentang demokrasi. Istilahnya sangat elastis dan mengembang serta menyesuaikan menurut waktu, tempat dan keadaan penggunaannya. Meskipun demikian, berikut adalah beberapa deskripsi definisi demokrasi yang diberikan oleh para ahli.

² Crick, B. (2002). *Democracy: A very short introduction*. OUP Oxford.

Daftar Pustaka

- Allen, D. (2022). *Introduction: What Is Democracy?*. Selengkapnya di <https://demo.democracyweb.org/Introduction-What-Is-Democracy> Diakses pada 20 Juni 2022.
- Britannica. 2021. *Know about democracy, its history, and advantage over other forms of government*. Selengkapnya di <https://www.britannica.com/video/213436/Questions-answers-democracy> Diakses pada 20 Juni 2022.
- 1 Crick, B. (2002). *Democracy: A very short introduction*. OUP Oxford.
- Dahl, R. A. (2020). *On democracy*. Yale university press; Dahl, R. A. (2008). *Democracy and its Critics*. Yale university press.
- Heywood, A. (2017). *Political ideologies: An introduction*. Macmillan International Higher Education.
- 20 Hirst, J. (2002). The Distinctiveness of Australian Democracy. *Quadrant*, 46(12), 19-27.
- 35 Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- 10 Kaban, R. (2003). Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara. *Perspektif*, 8(4), 290-302.
- Principle of Democracy. (2022). *Overview: What is Democracy*. Selengkapnya di <https://www.principlesofdemocracy.org/what> Diakses pada 17 Juni 2022.
- 81 Schumpeter, J. A. (2013). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Routledge.
- Wahyudi, A. (2014). Radikalisasi Demokrasi: Catatan Pengantar. *Jurnal Filsafat*, 24(1), 1-13.
- 26 Wolff, J. (2006). *An Introduction to Political Philosophy*, Revised Ed. Oxford University Press, Oxford.

Tentang Penulis



Dr. Andi Tenri Sompia, SIP., M.Si; lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1976. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, S1 Program Studi Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Program Studi

Sosiologi Politik di Universitas Airlangga Surabaya dan S3 Program Studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dan menjabat Lektor pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekretaris pada Program Doktor Studi Pembangunan ULM serta Direktur Center for Election and Political Party University Link Universitas Lambung Mangkurat (CEPP ULM). Pernah menjadi tenaga edukatif di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Pancasakti Makassar, Universitas Widya Kartika Surabaya dan Universitas Islam Kalimantan Selatan.

BAB

14

KEKUASAAN

Muhammad Lutfi, S.IP., M.A.
Universitas Muhammadiyah Sinjai
Email: lutfigov@gmail.com

A. Pengertian Kekuasaan

Konsep Kekuasaan senantiasa menjadi salah satu bahasan dalam berbagai kajian dan literatur di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Bahkan, perdebatan tentang konsep kekuasaan terjadi pada berbagai aspek, misalnya yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan kekuasaan, bagaimana kekuasaan dijalankan dan didistribusikan, serta siapa saja yang memiliki kekuasaan tersebut.

Dalam mendefinisikan tentang kekuasaan, berikut disajikan beberapa pandangan para ahli. Kebanyakan sarjana berpangkal tolak dari perumusan sosiolog Max Weber yang mengemukakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini (Budiardjo, 2010). Sementara menurut van Doorn (1957) menyatakan bahwa kekuasaan sebagai kemampuan pelaku untuk menetapkan (secara mutlak) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih pelaku yang lain. Di mana dalam hal ini pelaku A (subyek kekuasaan) dapat menetapkan alternatif dengan dua cara, yaitu membatasi alternatif bertindak atau memilih (*punishment*), dan memperluas alternatif bertindak atau memilih (*reward*). Hal ini berarti mengkaitkan kekuasaan dengan kesempatan yang

Daftar Pustaka

- Anderson, R.O'G Benedict. 1984. Gagasan Tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa; dalam Miriam Budiardjo: *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik; Edisi Revisi Cetakan Keempat*. PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Haryanto. 2017. *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar. Cet. 1*. Penerbit Polgov UGM; Yogyakarta.
- Ratnawati, dan AAGN Ari Dwipayana. 2005. *Modul: Teori Politik. Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta.*

Tentang Penulis



Muhammad Lutfi, S.IP., M.A. Lahir di Sinjai pada tanggal 25 Nopember 1976. Menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri No. 75 Lembanna Kab. Sinjai dan tamat pada Tahun 1989, jenjang SLTP ditempuh di Madrasah Tsanawiyah Mursyidut Thullab Lembanna dan tamat pada Tahun 1992. Setelah itu melanjutkan ke jenjang SLTA di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ujung Pandang (sekarang Makassar) dan Tamat pada Tahun 1995. Setelah lama “menganggur”, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Muhammadiyah Sinjai pada Tahun 2003 dan selesai pada Tahun 2007. Selanjutnya pada Tahun 2010 kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di Jurusan Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan selesai pada pada Tahun 2012. Saat ini sedang menempuh pendidikannya pada jenjang S3 di Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar. Aktivitas saat ini adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain sebagai dosen, penulis juga sejak Tahun 2021 dipercaya sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kerjasama dan PMB. Sejak tahun 2019 juga dipercaya menjadi Sekretaris Umum Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) serta aktif menjadi anggota Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI).

BAB

15

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

63

Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si.

Universitas Galuh

Email: irfan.nursetiawan@gmail.com

A. Pemimpin dan Kepemimpinan

1. Pengertian Pemimpin

Era disrupsi dan *civil society 5.0* telah mengubah perilaku, serta kehidupan masyarakat yang cenderung harus adaptif khususnya terhadap perkembangan teknologi informasi. Ketidakstabilan ekonomi menjadikan masyarakat menuntut pemerataan kesejahteraan yang tentunya mendukung dalam sendi kehidupan sosial masyarakat tanpa klusterisasi. *Era society 5.0* merupakan segala bentuk teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia (Sulistiyanto, D., & Abdullah, S. M., 2021). Dengan kondisi seperti hal tersebut, maka diperlukan “sosok” pemimpin yang mempunyai pemikiran yang lebih reflektif dan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi.

Pemimpin dalam sebuah Negara dan atau bahkan ditingkat *grassroots* (akar rumput) mempunyai peran sebagai seorang *leader* dengan gaya kepemimpinan yang bersifat *pluralism* dan tentunya hal tersebut dapat berasal dari sejak lahir, serta terbentuk dari lingkungan yang mendukung dalam pembentukan seorang pemimpin yang berkarakter. Bahkan, pemimpin ditentukan oleh masalah pemerintahan dan konteks lingkungan yang dihadapinya. Permasalahan

Daftar Pustaka

- Afandi, R. (2013). Efektifitas Kepemimpinan Transformatif Pesantren Bagi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 99-122.
- Anggriawan, F. (2017). Gaya Komunikasi Pimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Area Pelayanan di Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(4), 260-274.
- Anwar, Khairul (2020). *Ilmu Pemerintahan: Disiplin dan Metodologi*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Adha, R. N., Qomariah, N., & Hafidzi, A. H. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4(1), 47-62.
- Djunaedi, A. F. (2005). Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, (13), 26027.
- Djunaedi, R. N., & Gunawan, L. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 3(3), 401-408.
- Fachrudin, M. A., & Yuwono, T. (2017). Inovasi Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus: Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, MT). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 141-150.
- Handayani, R. (2020). Peran Pemimpin Islam Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Team Work. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 2(1), 155-172.
- Handoko, H., & Tjiptono, F. (1996). Kepemimpinan transformasional dan pemberdayaan. *Jurnal, JEBl*.
- Hanoraga, T. (2008). Dialektika Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 1(1), 43-65.

Tentang Penulis



Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si. lahir di Ciamis, 21 Maret 1990. Lulus S1 di Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi tahun 2012, lulus S2 di Program Magister Administrasi Pendidikan Universitas Galuh tahun 2014, dan lulus S2 di Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Tasikmalaya tahun 2017. Saat ini adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh dan menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan periode 2019-2023. Pernah mengikuti pelatihan dan sertifikasi BNSP *Training of Trainer (ToT)* Level 4 tahun 2021.

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202260646, 2 September 2022

Pencipta
Nama : **Ahmad Mustanir, Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si. dkk**
Alamat : Jl. Ahmad Taufik No 50 Rappang, Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang, SULAWESI SELATAN, 91651
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Ahmad Mustanir, Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si. dkk**
Alamat : Jl. Ahmad Taufik No 50 Rappang, Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang, SULAWESI SELATAN, 91651
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pengantar Ilmu Pemerintahan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Agustus 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000376380

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ahmad Mustanir	Jl. Ahmad Taufik No 50 Rappang, Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan
2	Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si.	Jl. Andi Sulolipu No. 28 Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Kode Pos 91651
3	Muhammad Ikbal	Jl. Poros Pinrang, Kelurahan Baranti Mario, Kecamatan Baranti Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan
4	Muhammad Arif, S.IP., M.I.K	Jl. Griya Gg. Swadaya No.3 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau
5	Sumardi, S.Ip., M.I.P	Tokka, Alehanuae, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan
6	Rulida Yuniarsih	Jl. H.R.A. Rahman Gg. Bandahara No.8 Pontianak
7	Itok Wicaksono	Perum Muktisari Blok AC-11 Jember
8	Ferri Wicaksono	Dk. Ngebuk RT. 04 RW. 07 No. 70, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57167
9	Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si	Perum Griya Setia Makmur, Blok B 05 No 07 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kabupaten Kampar-Provinsi Riau
10	Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si	Jl. Anoa No. 14 D Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Kode Pos 91661
11	Erfina	Jl. Mustika Rappang, Sidrap
12	Yusuf Adam Hilman, S.I.P., M.Si	Perum ASABRI Blok A3 Pijeran Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Indonesia
13	Andi Tenri Sompia	Komp. Perdagangan Permai II No. 21 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
14	Muhammad Lutfi	Graha Bongki Permai I Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
15	Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si	Lingkungan Rungki RT. 01 RW. 03 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis 46212

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Ahmad Mustanir	Jl. Ahmad Taufik No 50 Rappang, Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan
2	Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si.	Jl. Andi Sulolipu No. 28 Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan Kode Pos 91651
3	Muhammad Ikbal	Jl. Poros Pinrang, Kelurahan Baranti Mario, Kecamatan Baranti Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan
4	Muhammad Arif, S.IP., M.I.K	Jl. Griya Gg. Swadaya No.3 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau
5	Sumardi, S.Ip., M.I.P	Tokka, Alehanuae, Sinjai Utara, Sinjai, Sulawesi Selatan
6	Rulida Yuniarsih	Jl. H.R.A. Rahman Gg. Bandahara No.8 Pontianak
7	Itok Wicaksono	Perum Muktisari Blok AC-11 Jember

8	Ferri Wicaksono	Dk. Ngebuk RT. 04 RW. 07 No. 70, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57167
9	Amir Syamsuadi, S.I.P., M.Si	Perum Griya Setia Makmur, Blok B 05 No 07 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kabupaten Kampar-Provinsi Riau
10	Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si	Jl. Anoa No. 14 D Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Kode Pos 91661
11	Erfina	Jl. Mustika Rappang, Sidrap
12	Yusuf Adam Hilman, S.I.P., M.Si	Perum ASABRI Blok A3 Pijeran Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Indonesia
13	Andi Tenri Somba	Komp. Perdagangan Permai II No. 21 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
14	Muhammad Lutfi	Graha Bongki Permai I Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
15	Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si	Lingkungan Rungki RT.01 RW. 03 Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis 46212



● **20% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 20% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	researchgate.net Internet	<1%
2	msn.com Internet	<1%
3	repository.penerbitwidina.com Internet	<1%
4	repository.bsi.ac.id Internet	<1%
5	media.neliti.com Internet	<1%
6	repository.penerbiteureka.com Internet	<1%
7	repository.uinjambi.ac.id Internet	<1%
8	123dok.com Internet	<1%
9	dspace.uii.ac.id Internet	<1%

10	scribd.com Internet	<1%
11	text-id.123dok.com Internet	<1%
12	vdocuments.mx Internet	<1%
13	link.springer.com Internet	<1%
14	books.google.co.id Internet	<1%
15	play.google.com Internet	<1%
16	id.scribd.com Internet	<1%
17	jurnal.ugj.ac.id Internet	<1%
18	nakhoda.ejournal.unri.ac.id Internet	<1%
19	sumardiblogadress.blogspot.com Internet	<1%
20	tandfonline.com Internet	<1%
21	jsp.fisip-unmul.ac.id Internet	<1%

22	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
23	ayshaazirakameela.medium.com	Internet	<1%
24	mangkucarito.wordpress.com	Internet	<1%
25	bagascahyablog.wordpress.com	Internet	<1%
26	core.ac.uk	Internet	<1%
27	dpublication.com	Internet	<1%
28	fsu.usim.edu.my	Internet	<1%
29	jurnal.unsil.ac.id	Internet	<1%
30	digilib.uinsby.ac.id	Internet	<1%
31	journals.cambridge.org	Internet	<1%
32	journal.stieamkop.ac.id	Internet	<1%
33	garuda.kemdikbud.go.id	Internet	<1%

34	keuangan.umm.ac.id	Internet	<1%
35	digilibadmin.unismuh.ac.id	Internet	<1%
36	files.osf.io	Internet	<1%
37	repository.umpalopo.ac.id	Internet	<1%
38	jurnal-umbuton.ac.id	Internet	<1%
39	celotehlestarius.blogspot.com	Internet	<1%
40	journal.universitassuryadarma.ac.id	Internet	<1%
41	repositorio.ual.pt	Internet	<1%
42	W Rasaili, Dafik, R Hidayat, H Prayitno. "On strengthening the local poli...	Crossref	<1%
43	ouci.dntb.gov.ua	Internet	<1%
44	repository.upi.edu	Internet	<1%
45	simdos.unud.ac.id	Internet	<1%

46	ebin.pub Internet	<1%
47	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet	<1%
48	id.123dok.com Internet	<1%
49	j-las.lemkomindo.org Internet	<1%
50	journal.amikindonesia.ac.id Internet	<1%
51	jurnal.apmd.ac.id Internet	<1%
52	riset.unisma.ac.id Internet	<1%
53	Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANG... Crossref	<1%
54	Rudolf Klein. "Book reviews", Local Government Studies, 01/1979 Crossref	<1%
55	erepo.unud.ac.id Internet	<1%
56	journal.kpu.go.id Internet	<1%
57	jurnalmahasiswa.umsu.ac.id Internet	<1%

58	repository.uinjkt.ac.id	Internet	<1%
59	salmantabir.wordpress.com	Internet	<1%
60	stisipm-sinjai.ac.id	Internet	<1%
61	slideshare.net	Internet	<1%
62	ejournal.uniks.ac.id	Internet	<1%
63	fisip.unigal.ac.id	Internet	<1%
64	pengertiandanartikel.blogspot.com	Internet	<1%
65	ulm.ac.id	Internet	<1%
66	Nils C. Bandelow, Johanna Hornung. "Policymaking in multiple Europe..."	Crossref	<1%
67	adoc.site	Internet	<1%
68	archive.org	Internet	<1%
69	ejournal.unsrat.ac.id	Internet	<1%

70	fadlanhidayatnk.blogspot.com	Internet	<1%
71	hrmars.com	Internet	<1%
72	journal.ibrahimy.ac.id	Internet	<1%
73	journal.unismuh.ac.id	Internet	<1%
74	mypopularaddres.blogspot.com	Internet	<1%
75	qualitatif.quantum-hrmi.com	Internet	<1%
76	repositori.uin-alauddin.ac.id	Internet	<1%
77	repository.usu.ac.id	Internet	<1%
78	scholar.google.com	Internet	<1%
79	scholar.unand.ac.id	Internet	<1%
80	acarindex.com	Internet	<1%
81	ewaluacja.gov.pl	Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Desain Sampul : Eri SetiawanTata Letak: Siwi Rimayani OktoralISBN: 978-623

repository.penerbiteureka.com

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh darikesempurnaan. Oleh karena itu ...

repository.penerbiteureka.com

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.SiUniversitas Muhammadiyah Sidenreng RappangEmail ...

repository.penerbiteureka.com

Latif, A., Irwan, I., & Mustanir, A. (2019). Analisis KepemimpinanTerhadap Optimali...

repository.penerbiteureka.com

Pd., M.Pd

repository.uki.ac.id

Lahir di Rappang (Kab.Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari1974. Menempuh da...

repository.uki.ac.id

Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si.Universitas Muhammadiyah Sidenreng Ra...

repository.penerbiteureka.com

Tentang PenulisMuhammad Rais Rahmat Razak. Menulisbuku, impiannya sejak ja...

repository.penerbiteureka.com

STISIP dan STKIP, hingga mendapat persetujuan KemenristekDIKTI menjadi Unive...

repository.penerbiteureka.com

berkolaborasi menulis Book chapter, tentang Kampus Merdeka.Pada Milad kedua ...
repository.penerbiteureka.com

29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan
www.scribd.com

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA
123dok.com

Jakarta: Rineka Cipta.Syafiie, Inu Kencana. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. ...
www.scribd.com

Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yangterendah, mempunyai batas wil...
www.scribd.com

Administrasi Publik. Selain menulisjuga aktif melakukan riset, beberapa penelitian ...
repository.penerbiteureka.com

Pengertian Etika Istilah etika berasal dari bahasayunani kuno Ethos. Dalam bentuk ...
ejournal.uniks.ac.id

apabila kehidupan manusia
www.researchgate.net

dosen tetap pada Program Studi IlmuPemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu ...
repository.penerbitwidina.com

Desa atau sebutan lainnyaseperti negeri, marga, kampong, dusun, dati dan sebaga...
www.scribd.com

Menempuh danmenyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah
repository.penerbiteureka.com

Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitianantara lain dari Keme...
repository.penerbiteureka.com

I.P.,M.SiUniversitas Muhammadiyah Sidenreng RappangEmail

repository.penerbiteureka.com

selalu menarik untuk dijadikan bahan kajiankarena memiliki karakteristik tersendiri...

www.scribd.com

A. Konsep Good Governancelstilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam

www.scribd.com

Prodi Ilmu

repository.penerbiteureka.com

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.SiUniversitas Muhammadiyah Ponorogo

repository.penerbitwidina.com

Nizar, H. S. (2003). Konsep Negara dalam Pemikiran Politik IbnuKhaldun. Demokra...

repository.penerbitwidina.com

Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa

jurnalmahasiswa.umsu.ac.id

Ar, A. A., Mustanir, A., Syarifuddin, H., Jabbar, A., Sellang, K

files.osf.io

dari bahasa Latin Mos (tunggal) atau mores (jamak) yangsama artinya dengan ethi...

ejournal.uniks.ac.id

Mahfud, MD. (1993) Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. RinekaCipta, Jakarta

media.neliti.com

Jakarta.Brewster, R. Wallace. 1963. Government in Modern Society: WithEmphasis...

www.scribd.com

DaerahUU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPusat da...

core.ac.uk

Dr. Andi Tenri Somp, SIP., M.Si; lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1976. Menyelesaik...
ejournal.um-sorong.ac.id